

Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

Made Resmiani^{1*}, I Putu Gede Diatmika² 

¹Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha

* maderesmiani97@gmail.com^{1*}, gedediatmika@undiksha.ac.id²

Abstrak

Pemerintah dalam hal ini pemerintah desa menjadi sorotan berbagai pihak mengenai fungsi dan tugasnya untuk mengelola dana masyarakat dimana rentan terjadinya kecurangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, (2) pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, (3) pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa sebanyak 153 orang. Sedangkan penentuan sampel dengan teknik purposive sampling sehingga sampelnya didapatkan sebanyak 82 perangkat desa/responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang disebarlang langsung ke lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, (3) efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektifitas pengendalian internal sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : pencegahan kecurangan, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, efektifitas pengendalian internal

Abstract

The government, in this case the village government is under the spotlight of various parties regarding their functions and duties to manage public funds where fraud is vulnerable. This study aims to determine: (1) the influence of organizational culture on fraud prevention in village fund management, (2) the effect of human resource competence on fraud prevention in village fund management, (3) the effect of the effectiveness of internal control on fraud prevention in village fund management. The type of approach used is a quantitative approach. The population used in this study were all village officials as many as 153 people. While the determination of the sample with purposive sampling technique so that the sample obtained as many as 82 village / respondent. Data collection using a questionnaire distributed directly to the field with due regard to health protocols. The results of the research conducted are: (1) organizational culture has a significant positive effect on fraud prevention in village fund management, (2) human resource competence has a significant positive effect on fraud prevention in village fund management, (3) the effectiveness of internal control has a significant positive effect on preventing fraud in managing village funds. This research is expected to improve organizational culture, human resource competency, and effectiveness of internal control so as to avoid various forms of fraud in the management of village funds..

Keywords: fraud prevention, organizational culture, human resource competencies, effectiveness of internal control

Pendahuluan

Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk melakukan segala kegiatan dengan transparansi atau bertanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan serius. Baik tataran

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



legislatif, eksekutif maupun yudikatif diharuskan memiliki sebuah komitmen dalam upaya untuk menegakkan pemerintahan yang transparan dan pengelolaan yang benar dan baik. Diperlukan pemeriksaan, pengawasan maupun pengendalian di setiap kegiatan maupun aktivitas yang merupakan aspek yang paling utama dalam mendukung pemerintahan agar dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang baik.

Namun masih saja terdapat pemerintahan daerah atau pusat yang menunjukkan ketidaksiapan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan karena adanya pemerintahan yang baru. Ketidaksiapan tersebut lumrah terjadi karena memang pemerintahan masih baru dan perlu tindakan maupun cara-cara tertentu agar tata kelola dalam pemerintahan yang baik dan benar bisa berjalan. Organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintahan desa menjadi sorotan berbagai pihak mengenai fungsi dan tugasnya untuk mengelola dana masyarakat dimana rentan terjadinya kecurangan (Mawarni dkk, 2015). Hal tersebut dapat memicu terjadinya kasus yang terjadi di daerah yang sering kita jumpai seperti misalkan masalah penyelewengan dana, korupsi, ketidakterbukaan, pelanggaran maupun yang lain.

Masalah yang sering kita lihat salah satunya terdapat pada desa dimana Indonesian Corruption Watch mencatat kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun terus adanya peningkatan dan harus diselesaikan dengan cepat. Masalah korupsi merupakan salah satu topik menyeluruh dalam berbagai negara (Purnamawati, 2018). ICW mencatat korupsi dana desa yang terjadi pada tahun 2015 terdapat 22 kasus korupsi. Terjadi peningkatan di tahun 2016 sebanyak 48 kasus. Angka tersebut meningkat lagi menjadi 98 kasus di tahun 2017 dan 96 kasus pada tahun 2018. Sehingga, total korupsi dana desa yang terjadi selama tahun 2015 sampai 2018 mencapai 252 kasus korupsi (CNN Indonesia, 2019). Kasus ini kebanyakan diakukan kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Pemerintah harus serius dalam menghadapi kasus ini sebelum menyebabkan peningkatan yang serius terhadap kasus tersebut dan bukan saling sanggah dan tidak mau menagani kasus ini.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang desa yang dikeluarkan atau disahkan 15 Januari 2014 yaitu UU Nomer 6 Tahun 2014 yang dikeluarkan yang menyangkut mengenai desa. Dimana dalam uu ini berisi desa akan mendapatkan sejumlah dana dengan presentase 10% dari jumlah APBN. Dana yang didapatkan dari APBN yang kemudian disalurkan ke APBD dan selanjutnya disalurkan ke desa berupa APBDes. Terdapat tiga tahapan penyaluran yaitu pada tahap 1 sebesar 20% paling cepat januari dan lambat nya pada bulan Juni minggu ke tiga. Tahap 2 yaitu sebesar 40% paling cepat bulan maret dan lambat nya didapatkan bulan Juni minggu ke 4 bulan tersebut. Selanjutnya pada tahap 3 dengan presentase 40% yang diterima tercepat pada Juli dan paling lambat diterima desa pada November. Penyaluran dana disalurkan dengan ketentuan penyaluran tahap 1 diterima apabila sudah memenuhi persyaratan penyaluran tahap ke tiga berupa laporan realisasi begitu juga pada tahap 2 dan 3 diterima apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut. Pendistribusian dana desa yang dilakukan jika telah terealisasi dengan benar dan lancar ke desa maka diperlukan dana desa dengan penggunaan yang tepat.

Dana desa diperuntukan dalam hal pembiayaan untuk pemerdayaan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat desa, khususnya dalam menaikkan kualitas hidup serta penanggulangan terhadap kemiskinan. Dilansir dari Kompas.com (2019), dana desa yang dianggarkan selalu mengalami kenaikan dimana tahun 2015 sebesar Rp 20,57 triliun, 2016 sebesar 46,98 triliun, 2017 dan 2018 sebesar 60 triliun, 2019 sebesar 70 triliun dan tahun 2020 sebesar 72 triliun. Angka tersebut membuktikan bahwa dana desa dianggarkan pemerintah ke desa selalu mengalami suatu peningkatan.

Penggunaan dana desa harus dilakukan secara efisien, akuntabel, efektif dan transparan adalah semua anggaran yang telah dikeluarkan harus dapat memberikan manfaat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Agar pengolaan dana desa dilakukan dengan

akuntabel dan transparansi, maka diperlukan pelaporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah digunakan untuk desa agar dapat mendapatkan dana desa berikutnya

Meskipun pengelolaan keuangan dana desa dipegang oleh kepala desa, namun masih saja ada kasus penyelewengan terhadap dana desa yang digunakan untuk kepentingannya sendiri. Beberapa kasus penyelewengan dana desa di beberapa daerah yaitu pertama, mantan Kepala Desa Arenan yang ditangkap karena pelimpahan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 698.845.600. Selain mantan kades, Kaur Keuangan Desa Arenan juga ikut melakukan penyalahgunaan wewenang menyebabkan adanya kerugian sebesar Rp 146.137.500 pada tahun 2015-2019 (Liputan6.com,2019). Kedua, kasus dugaan korupsi berupa penyelewengan Dana APBDes juga terjadi di Desa Tirtasari senilai hampir mencapai 1 M yang diungkap pada tahun 2019 (BaliEditor.com,2019). Kasus tersebut pertama kali diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Tirtasari dan memberikan keterangan atas perkara tersebut kepada Satreskrim Polres Buleleng. Dari hasil investigasi yang dilakukan ditemukan penyelewengan dana APBDes tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Wartabali.com,2019). Dimana tahun 2015, terdapat tunjangan penghasilan yang mengalami pembengkakan pada perangkat desa sebesar Rp 410 juta lebih. Tahun 2017, ditemukan penggelapan anggaran sebanyak Rp 95,644 juta. Dana tersebut dianggarkan untuk penyelesaian kantor desa yang telah dibangun pada tahun 2015 senilai Rp 270 juta lebih namun faktanya tidak ada kegiatan finishing kantor desa sampai saat ini dan juga penyimpangan pemasangan beton dengan volume bangunan yang tidak sesuai. Sedangkan pada tahun 2017, terdapat pada laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ketiga, di Dencarik korupsi sebesar 149 juta dengan ditemukan dua pembukuan yang berbeda (BaliPost.com,2017). Pembukuan tersebut tidak sesuai antara PAD di buku arus kas dengan APBDes.

Kasus diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih perlu dilakukan penanganan yang serius dan mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya kasus penyelewengan dana desa. Maka diperlukan minimalisir agar dapat mengurangi kasus tersebut. Namun, sebelum itu perlu diketahui faktor apa saja yang mengakibatkan munculnya kecurangan pada pengelolaan dana seperti budaya organisasi, kompetensi aparatur, dan efektivitas pengendalian internal.

Pertama, budaya organisasi merupakan satu dari faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Budaya sebagai pedoman maupun titik pandang yang secara bersamaan dijadikan sebagai jalan hidup oleh masyarakat. Budaya organisasi pada dasarnya akan memberikan sebuah gambaran perilaku yang sesuai yang dapat berpengaruh pada perilaku masyarakat yang teratur. Pihak manajemen maupun pemimpin perlu pemahaman betul budaya organisasi yang diterapkan oleh bawahannya untuk dituntun guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Maka dari itu budaya organisasi diartikan sebagai pedoman, nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan yang digunakan sebuah organisasi untuk dijadikan acuan dalam melakukan segala aktivitas yang ditujukan kepada pimpinan maupun bawahannya (Widiarta, 2017). Bila dikaitkan dengan masalah kecurangan dimana satu dari faktor pencegah terjadinya tindakan kecurangan yaitu etika yang dijunjung tinggi dan budaya yang baik serta konsisten (Adi dkk, 2016). Pemerintah atau organisasi bertanggungjawab dalam penerapan budaya yang baik dimana resiko yang muncul akibat adanya kecurangan dapat diminimalisir. Penelitian oleh Firnanda, dkk (2019) menyatakan bahwa dimana budaya organisasi ditemukan pengaruh positif maupun signifikan mengenai pencegahan kecurangan. Namun penelitian yang diteliti oleh Sukmadiani (2016) menyatakan bahwa variabel budaya organisasi ditemukan adanya pengaruh negatif maupun signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

H₁: Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa

Kedua, kompetensi SDM juga satu dari faktor yang mempengaruhi adanya tindak kecurangan dimana kompetensi SDM yang memadai apabila kualitas maupun kuantitas/jumlah akan mengalami peningkatan pada laporan realisasi anggaran, sehingga segala bentuk dari pertanggungjawaban dapat terhindar dari segala bentuk kecurangan (Admaja & Saputra, 2017). Kompetensi terhadap sumber daya manusia jika pengelolaan keuangan tidak profesional diakibatkan dari pemahaman akuntansi yang kurang sehingga dapat berpotensi terjadinya tindakan kecurangan. Selain itu, Badan Pengawas Keuangan juga menyatakan adanya masalah pengelolaan diakibatkan oleh beberapa hal yaitu terkait dengan pengetahuan perangkat desa dan kurang maksimalnya pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangannya (Purnamawati dan Adnyani, 2019). Diperlukan tingkatan kompetensi yang diharuskan dimiliki oleh perangkat desa adalah kemampuan dasar, manajemen maupun teknis. Pada penelitian yang diteliti oleh Agusyani dkk (2016) menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia terdapat adanya pengaruh yang signifikan dalam pencegahan kecurangan.

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa

Ketiga, efektifitas pada pengendalian internal pada sebuah organisasi harus dilakukan oleh orang yang bekerja pada organisasi tersebut agar tujuan yang telah disepakati agar bisa berjalan dengan lancar atau tercapai. Pengendalian internal yang sudah efektif diterapkan untuk membantu menjamin ketersediaan laporan keuangan dan manajemen yang bisa dipercaya, apabila didukung dengan adanya aturan yang telah dibuat untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang lebih-lebihkan ataupun ketidakwajaran yang nantinya bisa menyebabkan adanya kecurangan (Utari dkk, 2019). Prinsip efektifitas juga menggambarkan seberapa besar anggaran digunakan untuk mencapai tujuan maupun target yang telah disepakati sebelumnya (Purnamawati, 2018). Pengendalian internal yang efektif juga akan menyiapkan manajemen dalam organisasi untuk menghadapi perubahan yang cepat khususnya dalam bidang ekonomi, segala bentuk persaingan maupun yang lain. Kecendrungan terjadinya tindak kecurangan disebabkan adanya peluang bagi pihak yang melakukan kecurangan tersebut. Maka dari itu pengendalian internal memiliki peran penting agar terlindung dari tindakan dan kemungkinan terjadi kesalahan yang tidak sejalan dengan aturan. Pengendalian internal tidak efektif ataupun lemah membuat kecendrungan untuk menjalankan tindakan kecurangan yang bisa saja dilakukan orang di dalam organisasi tersebut. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian Wardana, dkk (2017) dimana pengendalian internal terdapat adanya pengaruh yang positif maupun signifikan pada pencegahan kecurangan.

H₃: Efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa

Metode

Penelitian yang diteliti adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Kecamatan Banjar, Buleleng. Rancangan ini digunakan guna mengetahui dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh dari budaya organisasi, kompetensi SDM, serta efektifitas pengendalian internal pada pencegahan kecurangan. Populasi penelitian ini adalah semua perangkat desa dengan jumlah 153 orang. Sedangkan sampel yang ditentukan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling sehingga sampelnya sebanyak 82 perangkat desa/responden.

Data dikumpulkan menggunakan sebuah kuesioner yang dibagikan langsung ke lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pengukuran kuesioner dengan

menggunakan skala likert yaitu STS/Sangat Tidak Setuju memiliki skor 1, TS/tidak setuju memiliki skor 2, N/netral memiliki skor 3, S/setuju memiliki skor 4, dan STS/sangat tidak setuju memiliki skor 5.

Pengujian data dengan teknik kualitas data terdiri atas uji reabilitas dan validitas. Adapun uji asumsi klasik penelitian ini dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Sedangkan pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji T.

Hasil dan Pembahasan

Data yang dikumpulkan dengan melakukan penyebaran sebuah kuesioner secara langsung ke lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kuesioner ini disebarkan sebanyak 82 kuesioner pada 17 desa Di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kuesioner yang disebarkan dengan kuesioner yang dikembalikan maupun diolah juga 82 kuesioner atau 100% dari total kuesioner tersebut. Hal tersebut menunjukkan partisipasi responden untuk mengisi kuesioner sudah baik.

Data kemudian diuji dengan menguji kualitas data dengan menggunakan dua uji yaitu validitas dan reabilitas. Pertama, uji validitas/valid menyatakan bahwa semua butir/item pertanyaan dari budaya organisasi, kompetensi terhadap sumber daya manusia, serta efektifitas pengendalian internal serta pencegahan kecurangan memiliki signifikansi dibawah angka 0,05 yaitu memiliki nilai signifikansi senilai 0.000. Selain itu Rhitung dari semua butir pertanyaan dari variabel dependen maupun independen menunjukkan angka lebih besar dari Rtabel dengan Rtabelnya sebesar 0,213. Hal tersebut menyimpulkan bahwa semua item/butir dari pertanyaan masing-masing variabel dinyatakan layak atau valid. Sedangkan pada uji reabilitas menyatakan bahwa butir pertanyaan dari variabel budaya organisasi, kompetensi SDM, dan efektifitas pengendalian internal ,serta pencegahan kecurangan menghasilkan Cronbach's Alpha > 0,60 dari kriteria yang sudah ditentukan dimana variabel budaya organisasi menghasilkan Cronbach's Alpha sejumlah 0,758. Kompetensi sumber daya manusia menghasilkan Cronbach's Alpha sejumlah 0,774. Efektifitas pengendalian internal menghasilkan Cronbach's Alpha sejumlah 0,804 serta pencegahan kecurangan menghasilkan Cronbach's Alpha sejumlah 0,800. Hal tersebut disimpulkan bahwa dari variabel dependen maupun independen yang digunakan penelitian ini yaitu reliabel yang artinya bahwa semua tanggapan dari responden mengenai item-item pertanyaan pada kuesioner sudah stabil/konsisten.

Pengujian asumsi klasik menggunakan uji normalitas, heteroskedas, serta multikolinieritas. Uji normalitas dilakukan untuk melakukan pengujian dimana apakah suatu data yang diolah menunjukkan distribusi yang normal. Kemudian, uji normalitas yang diterapkan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dimana dapat dikatakan normal jika memiliki probabilitas > 0,05. Hasil dari uji normalitas menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov sejumlah 0,635 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) sejumlah 0,816 yang artinya angka tersebut > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa dari data yang diambil pada penelitian ini mempunyai distribusi yang normal.

Uji multikolinieritas berguna sebagai penguji apakah model dari regres yangi didapatkan adanya korelasi varibel bebas satu maupun yang lain. Uji multikolinieritas menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi memiliki Tolerance sejumlah 0,606 dan VIF sejumlah 1,650. Variabel kompetensi sumber daya manusia menghasilkan Tolerance sejumlah 0,488 dan VIF sejumlah 2,051. Efektifitas pengendalian internal menunjukkan Tolerance sejumlah 0,686 dan VIF sejumlah 1,459. Angka-angka tersebut menunjukkan nilai Tolerance dari masing-masing variabel independen mempunyai Tolerance > 0,1 dan masing-masing variabel bebas memiliki VIF < dari 10. Hal tersebut disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang digunakan guna mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan mengenai variasi pada residual dari pengamatan satu dengan yang lainnya. Signifikansi yang dimiliki oleh variabel-variabel bebas bisa dilihat melalui pengujian heteroskedastisitas ini. Signifikansi menunjukkan angka > 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Variabel budaya organisasi menunjukkan signifikan sebesar 0,623. Kompetensi sumber daya manusia menunjukkan signifikan sejumlah 0.064. Efektifitas pengendalian internal menunjukkan signifikan sebesar 0,180. Angka-angka tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa variabel-variabel bebas tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas disebabkan karena signifikansinya > 0,05.

Uji hipotesis data dapat digunakan dengan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi serta uji T. Regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan guna mengetahui apakah ditemukan adanya pengaruh yang signifikan pada variabel bebas yaitu budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektifitas pengendalian terhadap variabel terikat yaitu pencegahan kecurangan. Pengujian dari analisis regresi linier berganda maka didapatkan hasil yaitu:

Tabel 1 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	4,705	2,402		1,959	,054
1	Budaya Organisasi	,265	,097	,241	2,727	,008
	Kompetensi SDM	,469	,106	,436	4,425	,000
	Efektifitas Pengendalian Internal	,278	,087	,267	3,206	,002

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020.

Tabel 1 tersebut didapatkan persamaan dari regresi linier berganda yaitu: $Y = 4,705 + 0,265X_1 + 0,469X_2 + 0,278X_3 + e$. Adapun Nilai konstanta yang didapatkan dari persamaan ini sejumlah 4,705. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa dimana jika nilai dari variabel budaya organisasi, kompetensi SDM, dan efektifitas pengendalian internal dapat dianggap stabil/konstan dimana rata-rata dari variabel dependen yaitu pencegahan terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Buleleng meningkat sebesar 4,705.

Koefisien dari regresi linier berganda pada variabel budaya organisasi adalah sejumlah 0,265. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat penambahan sejumlah satu satuan pada variabel independen budaya organisasi, maka variabel dependen pencegahan kecurangan juga terjadi peningkatan sejumlah 0,265 satuan.

Koefisien dari regresi linier berganda pada variabel independen kompetensi SDM adalah sejumlah 0,469. Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya penambahan sebanyak satu satuan dari variabel independen kompetensi SDM, maka variabel dependent pencegahan kecurangan juga terjadi peningkatan sejumlah 0,469 satuan.

Koefisien dari regresi linier berganda pada variabel independen efektifitas pengendalian internal adalah sejumlah 0,278. Angka tersebut menunjukkan bahwa penambahan sebesar satu satuan dari variabel efektifitas pengendalian internal, maka variabel pencegahan kecurangan juga mengalami adanya sebuah peningkatan sejumlah 0,278 satuan.

Uji hipotesis yang kedua yaitu koefisien determinasi dimana digunakan dalam penelitian ini guna mengukur berapa jauh kemampuan dari model untuk menjabarkan variasi dari variabel dependen. Kolom pada *Adjusted R Square* terdapat nilai dari koefisien determinasi. Nilai dari koefisien determinasi jika nilainya kecil dapat diartikan kemampuan pada variabel-variabel bebas guna dapat menerangkan variasi dari variabel terikat sangat

terbatas begitupun sebaliknya. Tabel berikut ini memperlihatkan hasil pengujian koefisien determinasi yaitu:

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R. Square	Adjusted R Square.	Std. Error of the Estimate
1	,794 ^a	,630	,616	1,626

a. Predictors: (Constant), Efektifitas Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Kompetensi SDM

b. Dependent Variabel: Pencegahan Kecurangan

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2020.

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa hasil dari uji koefisien determinasi sejumlah 0,616 atau 61,6%. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan atau variasi dari variabel independen budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektifitas pengendalian internal hanya mampu menjelaskan variabel dependen pencegahan kecurangan sejumlah 61,6%. 38,4% merupakan sisa yang dipengaruhi variabel lain maupun faktor-faktor diluar dari model penelitian ini yang bisa mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Pengujian hipotesis yang terakhir yaitu uji T adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara parsial atau tidak. Uji t yang digunakan bisa dilihat pada signifikansi, dimana apabila signifikan $< 0,05$ maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang dimana hipotesis yang telah diajukan ditolak/gagal begitupun sebaliknya. Uji T yang dihasilkan bisa dilihat di tabel 1 dimana semua variabel memiliki Thitung lebih besar dari Ttabelnya. Penelitian ini memiliki Ttabel sebesar 1,663 dengan jumlah responden sebanyak 82.

Variabel bebas yang pertama yaitu budaya organisasi mempunyai signifikansi sejumlah $0,008 < 0,05$. Thitungnya sebesar 2,727 sedangkan t tabel sejumlah 1,663 dengan t bernilai positif dimana varabel budaya organisasi mempunyai hubungan searah dengan variabel pencegahan kecurangan. Maka ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yaitu variabel budaya organisasi terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan

Variabel bebas yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia mempunyai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Thitung yang didapatkan sebesar 4,425 sedangkan t tabel sebesar 1,663 dengan t bernilai positif dimana varabel kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang searah dengan variabel pencegahan kecurangan. Maka kesimpulan yang bisa ditarik dimana hipotesis kedua variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan

Variabel bebas terakhir yaitu efektifitas pengendalian internal memiliki signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Thitung yang didapatkan sebesar 3,206 sedangkan t tabel sebesar 1,663 dengan t bernilai positif dimana varabel efektifitas pengendalian internal memiliki hubungan yang searah dengan variabel pencegahan kecurangan. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dimana hipotesis ketiga dari variabel efektifitas pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian pada hipotesis yang dihasilkan, pada regresi linier berganda koefisien dari regresi linier berganda pada variabel budaya organisasi adalah sejumlah 0,265 berarti penambahan sebesar satu satuan dan pencegahan kecurangan meningkat sebesar

0,265. Pengujian pada hipotesis pertama atau H1 yaitu budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan jumlah responden 82 orang memiliki nilai signifikansi 0,008. Angka tersebut menunjukkan signifikansi $<0,05$ atau $0,008 < 0,05$. Tabel tersebut juga menunjukkan t hitung sejumlah 2,727 sedangkan t tabelnya sejumlah 1,663 dengan t bernilai positif dimana variabel budaya organisasi memiliki hubungan yang searah dengan variabel pencegahan kecurangan. Maka disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi memiliki adanya pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi budaya organisasi dalam pemerintahan desa dalam mengelola dana desa maka semakin tinggi atau besar pula tingkat pencegahan terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel budaya organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan tindakan kecurangan. Pencegahan kecurangan pada desa di Kecamatan Banjar ini memiliki budaya organisasi yang baik dimana hal ini didukung dengan jawaban dari responden yang menjawab pertanyaan dengan pilihan setuju maupun sangat setuju. Budaya organisasi yang baik ini dapat mencerminkan kinerja dari pemerintahan desa dalam mengelola dana desanya dengan sebaik-baiknya. Adanya budaya organisasi dalam pemerintahan desa di Kecamatan Banjar dalam pengelolaan dana desa juga ikut mendorong dan mendukung kelancaran guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adanya budaya organisasi dalam pemerintahan desa di Kecamatan Banjar seperti misalnya dalam hal kerjasama antar pegawai dalam hal menyelesaikan tugas-tugas mengenai keuangan desa dimana terdapat budaya kerjasama yang kuat maka apa yang menjadi kewajiban untuk menyelesaikan tugas mengenai pengelolaan keuangan desa dapat diselesaikan dengan tepat dan baik serta mengurangi maupun meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Hal tersebut karena pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama-sama dan berfokus untuk menyelesaikannya dalam hal ini penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat mencerminkan bahwa desa tersebut taat pada aturan pemerintah tentang dana desa.

Dikaitkan dengan teori pengelolaan (Stewardship Theory) dimana menyatakan bahwa manajemen dalam hal ini pemerintah desa dituntut agar dapat memberikan sebuah pelayanan kepada pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat. Pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya dengan tepat dan benar dalam melaksanakan maupun merencanakan sampai pertanggungjawaban keuangan dengan maksimal. Untuk itu pemerintah desa dapat mengerahkan budaya organisasi guna tindakan kecurangan dapat dicegah dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian diperkuat oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian oleh Widiyarta (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sumedap dkk (2019) juga menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan fraud. Maka dalam hal ini budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan berpengaruh positif signifikan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil dari pengujian terhadap hipotesis yang telah dilakukan, pada regresi linier berganda koefisien dari regresi linier berganda pada variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sejumlah 0,469 yang artinya penambahan sebesar satu satuan dan pencegahan kecurangan meningkat sebesar 0,469. Pengujian pada hipotesis kedua atau H2 yaitu kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dengan jumlah responden 82 orang memiliki nilai signifikansi 0,000. Angka tersebut berarti nilai signifikansi

$<0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Tabel tersebut juga menunjukkan t hitung yang didapatkan sejumlah 4,425 sedangkan t tabel yang didapatkan sejumlah 1,663 dengan t bernilai positif dimana variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan searah dengan variabel pencegahan kecurangan. Maka bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_2 diterima yang artinya variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa semakin tingginya kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan desa dalam mengelola dana desa maka semakin tinggi atau besar pula tingkat pencegahan terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan menunjukkan hasil yang baik dimana dari jawaban responden kebanyakan menjawab setuju ataupun sangat setuju. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak responden memiliki pendidikan terakhir adalah SMA/SMK dimana hal tersebut dijadikan salah satu yang hal untuk mengukur tingkat kompetensi dalam pemerintahan desa. Meskipun kebanyakan hanya memiliki pendidikan SMA/SMK, akan tetapi mereka bekerja dalam jangka waktu yang lama bisa sampai puluhan tahun. Kompetensi tidak selalu diukur dengan tingkat pendidikan akan tetapi juga dapat dilihat dari pengalaman dan masa kerja dari seseorang. Masa kerja ataupun jabatan yang rata-rata sudah lama membuat mereka sudah ahli dalam melaksanakan tugas maupun kewajiban di tempat mereka bekerja. Hal tersebut dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini kompetensi yang dimiliki oleh pemerintahan desa di Kecamatan Banjar sudah dapat ditingkatkan dengan evaluasi, pengawasan maupun pelatihan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dalam desa. Pengalaman yang baik juga sangat diperlukan dalam pemahaman terhadap bagaimana mengelola keuangan dengan benar dan tepat. Pemerintah desa dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dapat menyebabkan adanya kerugian yang berdampak pada organisasinya. Kompetensi sumber daya manusia idealnya dikelola, dikembangkan, dipertahankan sehingga dapat dilakukan penyesuaian oleh organisasi sesuai kebutuhan dalam melakukan pekerjaan.

Dikaitkan dengan teori pengelolaan (Stewardship Theory) dimana menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki dalam hal ini kompetensi yang dimiliki oleh pemerintahan desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat menggambarkan sebagai pihak yang memerintah suatu desa tidak termotivasi pada tujuan-tujuan secara individu akan tetapi lebih diperuntukan mengenai sasaran utama yang ingin dicapai terhadap kepentingan suatu organisasi dalam hal ini pengelolaan terhadap dana desa di pemerintahan desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kompetensi yang dimiliki dapat memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana pemerintah desa untuk mengelola keuangan lepas dari adanya tindakan kecurangan yang terjadi. Maka dari itu kompetensi merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah adanya tindakan kecurangan pada pemerintahan desa.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian-penelitian yang terdahulu tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan Saputra dkk (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki adanya pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Laksmi & Sujana (2019) juga menyatakan kompetensi sumber daya manusia memiliki adanya pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan mengenai keuangan desa. Ardiyanti & Supriadi (2018) juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki adanya pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian-penelitian tersebut dapat

disimpulkan jika kompetensi sumber daya manusia memang akan mempengaruhi pencegahan terhadap tindakan kecurangan.

Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis pada regresi linier berganda dimana koefisien dari regresi linier berganda pada variabel efektifitas pengendalian internal adalah sebesar 0,278 yang artinya penambahan sebesar satu satuan dan pencegahan kecurangan meningkat sebesar 0,278. Pengujian pada hipotesis yang ketiga atau H3 yaitu efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dengan jumlah responden 82 orang memiliki nilai signifikansi 0,002. Angka tersebut berarti signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau $0,002 < 0,05$. Tabel tersebut juga menunjukkan t hitung sejumlah 3,206 sedangkan nilai t tabel sejumlah 1,663 dengan t bernilai positif dimana variabel efektifitas pengendalian internal memiliki hubungan yang searah terhadap variabel pencegahan kecurangan. Maka bisa disimpulkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan H3 diterima berarti variabel efektifitas pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif maupun signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan pada desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa semakin tingginya efektifitas pengendalian internal pada pemerintahan desa dalam mengelola dana desa maka semakin tinggi atau besar pula tingkat pencegahan terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Upaya pengendalian internal yang dilakukan dalam pemerintahan desa yang dilakukan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sudah menunjukkan hal yang baik dilihat dari jawaban responden yang rata-rata menjawab dengan pilihan setuju maupun sangat setuju. Organisasi membutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan kinerjanya dalam hal ini pengendalian internal yang efektif dalam hal pemantauan maupun pengawasan mengenai pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa di Kecamatan Banjar sudah menunjukkan adanya pengendalian internal yang baik. Hal ini didukung salah satunya dengan terdapatnya struktur organisasi di setiap organisasi yang menggambarkan tugas dan fungsi mereka dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang ditetapkan dan harus mereka lakukan. Jika terjadi masalah mengenai keuangan desa maka orang-orang yang menangani masalah ini dapat ditangani maupun dievaluasi.

Pengendalian internal yang efektif merupakan tanggungjawab pemerintahan desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam mencegah terjadinya kecurangan dimana pengendalian internal adalah proses yang sudah dirancanng dan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang dapat memberikan sebuah kepastian dalam hal pencapaian sebuah kegiatan yang dilakukan dengan efektif, efisien serta adanya keandalan pada laporan keuangan yang telah di buat dan patuh terhadap uu yang berlaku di daerah. Adanya pengendalian internal yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng juga dapat menunjukkan bahwa pemisahan wewenang mupun tugas sudah dapat diterapkan dilihat dari struktur organisasi.

Dikaitkan dengan teori pengelolaan (Stewardship Theory) dimana menyatakan bahwa organisasi pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dipersiapkan dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi dalam hal ini mengenai laporan keuangan desa yang diperlukan adanya pemantauan maupun pengawasan sehingga pemerintah khususnya pemerintah desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan tepat dan benar, merencanakan, melaksanakan serta mampu mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan maksimal dan terhindar dari adanya segala tindakan kecurangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan yang didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Wonar dkk (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki adanya pengaruh terhadap pencegahan fraud. Wardana dkk (2017) juga menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti & Supriadi (2018) yang menyatakan bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian-penelitian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektifitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dari pengujian data yang dilakukan didapatkan sebuah kesimpulan. Pertama, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan yang dilihat pada signifikansi sejumlah $0,008 < 0,05$ dimana t hitung $> t$ tabel yaitu $2,727 > 1,663$. Hal tersebut berarti semakin tinggi budaya organisasi dalam pemerintahan desa dalam mengelola dana desa maka semakin tinggi atau besar pula tingkat pencegahan terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan. Kedua, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan yang bisa dilihat pada signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4,425 > 1,663$. Hal tersebut berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan desa maka semakin tinggi atau besar pula tingkat pencegahan terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan. Ketiga, efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan yang bisa dilihat pada signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,206 > 1,663$. Hal tersebut berarti semakin tinggi efektifitas pengendalian internal dalam pemerintahan desa dalam mengelola dana desa maka semakin tinggi atau besar pula tingkat pencegahan terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan.

Uraian pada hasil penelitian yang didapatkan, adapun saran-saran diberikan yaitu: bagi instansi pemerintahan desa, disarankan untuk lebih meningkatkan budaya organisasi dalam pemerintahan yaitu budaya kerjasama agar dapat menyelesaikan tugas mengenai keuangan desa dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan atau memperluas wilayah penelitian serta menambah variabel bebasnya seperti variabel motivasi, whistleblowing, good village governance maupun variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Daftar Pustaka

- Adi, Moh. Risqi Kurnia, Komala Ardiyanti, dan Arum Ardianingsih. 2016. Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan. *Jurnal LITBANG* Vol. 10.
- Agusyani, Ni Kadek Siska, dkk. 2016. Pengaruh Whistleblowing System Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 6 No 3
- Ardiyanti, Anita dan Yudi Nur Supriadi. 2018. Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten

- Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manjerial*, Vol 3 No.1 Hal 1-20
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. 2017. Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Balieditor. 2019. Diduga Terjadi Penyalahgunaan Dana APBDes Hampir 1 Milyar di Desa Tirtasari. Tersedia pada: <https://balieditor.com/diduga-terjadi-penyalahgunaan-dana-apbdes-hampir-rp-1-m-di-desa-tirtasari/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2020
- Balipost. 2017. Diduga Selewengkan APBDes, Kades Dencarik Diadili. Tersedia pada: <http://www.balipost.com/news/2017/12/05/30502/Diduga-Selewengkan-APBDes,Kades-Dencarik...html>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2020
- CNN Indonesia. 2019. ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2020
- Firnanda, Rio, dkk. 2019. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Nasional Cendekiawan ke 5*
- Kompas. 2019. Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2020
- Laksmi, Putu Santi Putri dan I Ketut Sujana. 2019, Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 26 No 3 Hal 2155-2182
- Mawarni, Komang Tiara, I Gusti Ayu Purnamawati, dan Nyoman Trisna Herawati. Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu , Asimetri Informasi, Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 3(1).
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Purnamawati, I Gusti Ayu dan Ni Ketut Sari Adnyani. 2019. Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2) Hal.227-240
- Purnamawati, I Gusti Ayu. 2018. Dimensi Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pada Tradisi Nampah Batu. *Jurnal Akuntansi Multipragma*, Vol. 9(2), hal.312-330.
- Purnamawati, I Gusti Ayu. 2018. Individual Perception of Ethical Behavior and Whistleblowing on Fraud Detection Through Self-Efficacy. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22 (2):362-372,2018.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, dkk. 2019. Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, Vol 10 No 2
- Sukmadiani, Ni Luh Sri. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial, Moralitas, Dan Budaya Organisasi Dengan Konteks Lokal Menyama Braya Terhadap Kecendrungan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol 7 No. 2
- Sumendap, Priscilia, dkk. 2019. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Interveng. *Seminar Nasional Pakar ke 2*

- Utari, Ni Made Ayu Diah Utari, Edy Sujana, dan Adi Yuniarta. 2019. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Whistlebloing Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Buleleng. Jurnal Akuntansi Profesi. Vol.10 No 2 Desember 2019.
- Wardana, I Gede Adi Kusuma, dkk. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 8 No. 2
- Warta Bali. 2019. Tipikor Polres Buleleng Bidik Korupsi APBDes Tirtasari. Tersedia pada: <https://wartabalionline.com/index.php/2019/03/24/tipikor-polres-buleleng-bidik-korupsi-apbdes-tirtasari/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2020
- Widiarta, I Kadek Dwi Surya. 2017. “Memaknai Kearifan Lokal Menyama Braya Sebagai Landasan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Starlight Restaurant & Bungalows”. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 7 No. 1 Hal:1-11
- Widiyarta, Kadek. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 8 No 2
- Wonar, Klara, dkk. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Vol 1 No 2 Hal:63-69